



Efektivitas Pengelolaan Laporan Kejadian Bencana Dalam Manajemen Rehabilitasi Di BPBD Kab. Karawang

Karmelita Nurhaida¹, Anggi Pasca Arnu²

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Singaperbangsa Karawang
Karawang.Jl. H.S Ronggowaluyo, Telukjambe Timur. Kabupaten Karawang.
4136

Received: 09 November 2024
Revised : 16 November 2024
Accepted: 23 November 2024

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of managing disaster incident reports in rehabilitation management at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Karawang Regency. Descriptive research methods were used in this study to describe and explain the process of managing disaster incident reports and rehabilitation management carried out by BPBD Karawang Regency. Primary data was obtained through observation, interviews, and document studies at the BPBD, while secondary data was obtained from related literature and statistical data. The results of the study show that BPBD Karawang Regency has made sufficient efforts in managing disaster incident reports and implementing rehabilitation management. However, there are still a number of obstacles and challenges that affect the effectiveness of report management and the rehabilitation process, such as limited resources, coordination between agencies that is not yet optimal, and a lack of community participation. In conclusion, BPBD Karawang Regency needs to improve the effectiveness of managing disaster incident reports through steps such as increasing coordination with related agencies, increasing public awareness, and optimizing the use of available resources. This research can be a reference for BPBD and related parties in improving disaster rehabilitation management in Karawang Regency

Keywords: BPBD, Report Management, Rehabilitation Management.

(*) Corresponding Author: karmelitanurhaida21@gmail.com

How to Cite: Nurhaida, K., & Arnu, A. P. (2024). Efektivitas Pengelolaan Laporan Kejadian Bencana Dalam Manajemen Rehabilitasi Di BPBD Kab. Karawang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14574816>

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah yang strategis, terletak di garis khatulistiwa dan berada pada perpotongan dua benua dan dua samudra. Meskipun wilayah ini memiliki keunggulan alam yang beragam, namun juga terletak di daerah yang rawan terhadap bencana akibat kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang ada. Kondisi ini menyebabkan frekuensi bencana di Indonesia cukup tinggi, sehingga memerlukan pendekatan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi (BNPB, 2014).

BPBD merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana dengan salah satu aspek penanggulangan bencana yaitu bidang rehabilitasi. Oleh karena itu, bidang manajemen rehabilitasi menjadi sangat penting dalam penanggulangan bencana. Manajemen rehabilitasi melibatkan upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat di wilayah pasca bencana, dengan tujuan untuk memulihkan kehidupan masyarakat dan memastikan berjalannya kembali seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan secara normal. Menurut Hasibuan dalam

(Syafuruddin 2022) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan instansi dan masyarakat. Tugas utama dari manajemen sumber daya manusia sendiri adalah mengelola manusia secara efektif dan efisien sehingga diperoleh SDM yang efektif dan efisien. (Paputungan, 2023)

Implementasi tahapan rehabilitasi harus terkait erat dengan tahapan lainnya. Namun, di Kabupaten Karawang, masih ada banyak masyarakat yang belum mendapatkan prioritas pemulihan pasca bencana. Oleh karena itu, upaya rehabilitasi sangat penting untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan akibat bencana alam. Bencana yang terjadi di suatu wilayah biasanya datang tiba-tiba dan memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia, seperti kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan bahkan hilangnya nyawa dari berbagai usia masyarakat. (Peraturan Kepala BNPB, 2023)

Dalam konteks ini, pengelolaan laporan dalam manajemen rehabilitasi memiliki peranan yang sangat penting. Pengelolaan laporan yang baik dapat membantu mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi secara terstruktur, berdasarkan analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Dengan adanya pengelolaan laporan yang efektif, upaya rehabilitasi dapat dilakukan dengan lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga membantu memulihkan kehidupan masyarakat pasca bencana dengan lebih efisien.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena atau keadaan yang ada secara detail. Dalam konteks jurnal ini, metode penelitian deskriptif dapat digunakan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan laporan kejadian bencana dalam manajemen rehabilitasi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang (Sugiyono, 2019). Dengan melakukan observasi serta mengumpulkan data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari BPBD Kabupaten Karawang, seperti dokumen laporan kejadian bencana, dokumen manajemen rehabilitasi dan data terkait lainnya. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang relevan, seperti literatur terkait, laporan penelitian sebelumnya dan data statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Rehabilitasi

Manajemen rehabilitasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang merupakan upaya penting dalam memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan setelah terjadinya bencana. Dalam pembahasan ini, akan dibahas beberapa aspek terkait manajemen rehabilitasi di BPBD Kabupaten Karawang.

1) Identifikasi dan Evaluasi Kerusakan: BPBD Kabupaten Karawang melakukan langkah awal dalam manajemen rehabilitasi dengan melakukan identifikasi dan evaluasi kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Melalui

pemetaan dan survei, mereka mengidentifikasi daerah-daerah yang mengalami kerusakan yang membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi.

2) Perencanaan dan Pengorganisasian: Setelah identifikasi dan evaluasi kerusakan dilakukan, BPBD Kabupaten Karawang melakukan perencanaan rehabilitasi. Kemudian merumuskan strategi dan rencana tindakan untuk memulihkan daerah yang terdampak bencana. Perencanaan meliputi alokasi sumber daya, penentuan anggaran, penjadwalan, dan pengorganisasian tim atau unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan rehabilitasi.

3) Koordinasi dan Kolaborasi: Manajemen rehabilitasi di BPBD Kabupaten Karawang melibatkan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

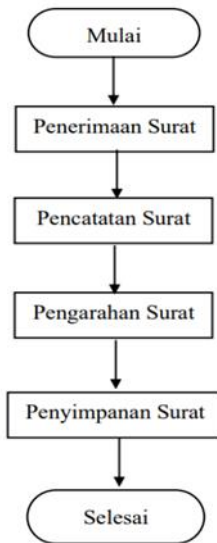
4) Pelaksanaan dan Monitoring: Langkah-langkah rehabilitasi meliputi perbaikan infrastruktur, pemulihan sarana publik, penyediaan bantuan sosial, dan pendampingan masyarakat dalam memulihkan kehidupan mereka. Selain itu, BPBD juga melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa rehabilitasi berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi kendala atau hambatan yang muncul, serta melakukan perbaikan jika diperlukan.

5) Pendekatan Berkelanjutan dan Kapasitas Masyarakat: BPBD Kabupaten Karawang juga mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam manajemen rehabilitasi. Upaya ini melibatkan penyuluhan, pelatihan, dan pembangunan kesadaran masyarakat tentang tindakan mitigasi bencana serta pengembangan rencana tanggap darurat.

Dalam konteks magang ini, BPBD Kabupaten Karawang berperan dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dalam (Peraturan Bupati Karawang, 2023) Melalui kegiatan magang, diharapkan mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman dan keterampilan praktis dalam bidang manajemen rehabilitasi bencana. Dalam konteks ini, pemegang diharapkan untuk selalu siap menghadapi kegiatan yang mungkin terjadi secara mendadak dan memperoleh pembelajaran mengenai hal-hal penting berikut ini : (BNPBB, 2020)

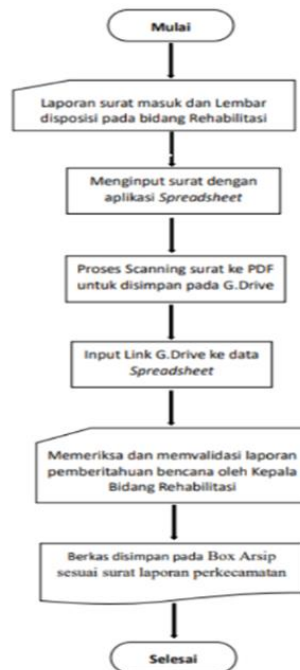
Alur proses pengelolaan surat masuk laporan kejadian bencana alam/non alam

Melalui tugas awal yang diberikan, pemegang akan mengelola surat masuk laporan kejadian bencana alam/non alam dengan secara manual mencatatnya dalam buku agenda surat masuk dan melaporkannya kepada kepala bidang manajemen rehabilitasi. Proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar memerlukan prosedur yang terstruktur dengan baik untuk memastikan kelancaran, efektivitas, efisiensi dan optimalitas kegiatan administrasi dalam organisasi. Pada hakikatnya, pelayanan publik merupakan kewajiban para penyelenggara pelayanan publik dalam rangka pemuasan kebutuhan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.(Fitriyah & Arif, 2023)



Gambar 1. Flowchart Pengelolaan Surat

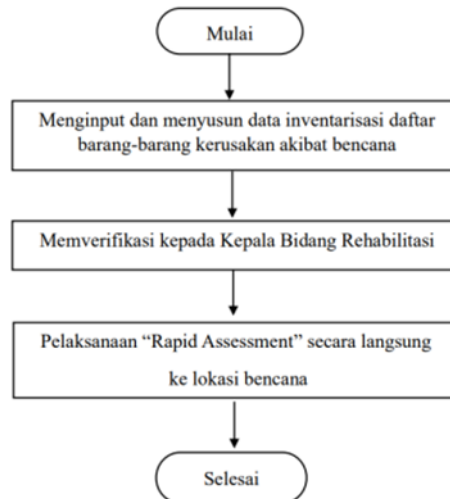
Praktikan melakukan inovasi dengan membuat sistem informasi manajemen pengelolaan surat berbasis teknologi modern yang tentunya sangat membantu pengelolaan surat di bidang Rehabilitasi. Google Spreadsheet adalah aplikasi web yang menyediakan akses online dan digunakan secara kolaborasi. Google Spreadsheet terdiri dari Spreadsheet individual yang dapat memasukan, mengatur data dan menggunakan data tersebut untuk melakukan perhitungan atau mengidentifikasi tren. Setelah menginput dilanjutkan proses scanning surat untuk disimpan pada Google Drive. Pemanfaatan Google Drive sebagai sarana penyimpanan surat bertujuan agar file tidak akan hilang, pencarian berkas yang tidak memerlukan waktu lama, serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun dibutuhkan.



Gambar 2. Inovasi Pengelolaan Surat

Pengolahan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan serta analisis kerugian akibat bencana

Inventarisasi merupakan kegiatan pengumpulan dan pengorganisasian data dan informasi mengenai tingkat kerusakan atau kerugian akibat bencana. Hal ini bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya yang perlu direhabilitasi dan melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.



Gambar 3. Flowchart Pengelolaan Inventarisasi

Merekapitulasi dan pengelolaan data laporan bencana setiap bulan sebagai bahan evaluasi

Pemangag bertugas untuk merekapitulasi dan mengelola data laporan bencana yang terjadi setiap bulan. Data ini diperoleh dari surat pengajuan yang dikirimkan oleh kelurahan terdampak bencana kepada BPBD. Setelah data direkapitulasi oleh pemangag, data tersebut diperiksa ulang oleh staf yang bertanggung jawab di bidang rehabilitasi sebelum diserahkan kepada kepala bidang sebagai bahan evaluasi.

Pelaporan dan evaluasi kegiatan di bidang manajemen rehabilitasi

Dilakukan setiap bulan atau triwulan sebagai bagian dari evaluasi, pemantauan, dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pasca bencana. Laporan tersebut mencakup perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

Kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) mengenai mitigasi bencana bersama satgas BPBD

Dampak bencana alam tidak hanya menimpa fisik, tetapi aspek psikologis sosial korban juga harus mendapat perhatian penting dalam penanggulangan bencana secara keseluruhan. Mengutip teori Hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow "A Theory of Human Motivation", di *Psychological Review* pada tahun 1943. Dalam kegiatan sosialisasi ini, rehabilitasi psikologis pasca bencana sangat penting. Dengan merumuskan seluruh aspek kebutuhan sosialisasi bersama Satgas BPBD dan bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan. Menumbuhkan kembali semangat dan memberikan motivasi untuk korban bencana alam. Praktikan membantu merumuskan seluruh aspek kebutuhan sosialisasi, seperti penyusunan materi tentang mitigasi bencana dan persiapan alat-alat yang diperlukan saat sosialisasi (PP Presiden, 2008).

Melibatkan praktikan dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana merupakan langkah konkret dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan laporan kejadian bencana. Praktikan dapat membantu dalam menyusun materi yang relevan, menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan lebih terarah dan efektif, serta mempersiapkan alat-alat yang mendukung sosialisasi tersebut. Keberadaan praktikan dalam kegiatan sosialisasi dapat dievaluasi dalam jurnal tersebut, termasuk dampak positifnya terhadap pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana dan efektivitas penggunaan alat-alat yang disiapkan praktikan dalam menyampaikan informasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan dari Instansi diperlukan pengembangan pada sumber daya manusia. Pengembangan SDM dapat menunjang keberhasilan, artinya apabila SDM memiliki potensi yang bagus untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pekerja maka akan membantu peningkatan pada pelayanan instansi. (Chandra Sagul Haratua 2023) Untuk meningkatkan efektivitas upaya mitigasi dan manajemen rehabilitasi bencana di wilayah tersebut, beberapa langkah dapat diambil:

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Melakukan sosialisasi dan kampanye yang lebih luas tentang pentingnya mitigasi bencana dan manajemen rehabilitasi kepada masyarakat. Informasi mengenai risiko bencana, tindakan yang dapat dilakukan sebelum, selama dan setelah bencana, serta manfaat mitigasi bencana perlu disampaikan secara teratur dan jelas kepada masyarakat. Dalam hal ini, praktikan dapat berperan aktif dalam menyusun materi dan melakukan sosialisasi yang tepat dan mudah dipahami oleh masyarakat.

2) Peningkatan Kerjasama Antar instansi: Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BPBD Kabupaten Karawang dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sinergi yang baik antarinstansi akan memperkuat upaya mitigasi dan manajemen rehabilitasi bencana. Praktikan dapat membantu dalam membangun jaringan kerjasama ini melalui partisipasi dalam pertemuan, diskusi, dan kegiatan kolaboratif dengan instansi terkait.

3) Pengembangan Rencana Tanggap Darurat: Memastikan adanya rencana tanggap darurat yang jelas dan terstruktur. Rencana tersebut harus mencakup prosedur evakuasi, komunikasi dan alokasi sumber daya yang tepat dalam situasi bencana. Praktikan dapat berkontribusi dalam menyusun atau memperbarui rencana tanggap darurat yang ada, serta melakukan pelatihan dan simulasi untuk memastikan pemahaman dan kesiapan personel terkait.

4) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja: Melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi personel di BPBD Kabupaten Karawang. Pelatihan tersebut dapat meliputi manajemen risiko bencana, analisis kerentanan, manajemen logistik, pemetaan risiko, dan keterampilan komunikasi dalam situasi darurat. Praktikan dapat ikut serta dalam kegiatan pelatihan ini, baik sebagai peserta maupun fasilitator, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kompetensi personel BPBD.

5) Penggunaan Teknologi dan Inovasi: Memanfaatkan teknologi dan inovasi terkini dalam pengelolaan laporan kejadian bencana, mitigasi bencana, dan manajemen rehabilitasi.

KESIMPULAN

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana. BPBD berada di bawah pengawasan pemerintah dan memiliki peran penting dalam menangani bencana di setiap daerah, termasuk Kabupaten Karawang. Selama magang, praktikan memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang profesionalitas dalam bekerja serta mampu mengaplikasikan teori yang dipelajari di perguruan tinggi dalam konteks dunia kerja, praktikan dapat memahami dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Karawang, terutama dalam bidang rehabilitasi pasca bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- BNPB. (2018). *Implementation of Disaster Risk Reduction in Indonesia 2007-2008*.
- BNPB. (2020). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014*.
- BNPB. (2017). *Buku Panduan Fasilitator : Modul Pelatihan Dasar Penanggulangan Bencana*. Diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (Cetakan Pe).
- Fitriyah, A. N., & Arif, L. (2023). *Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Medokan Ayu Kecamatan Rungkut KOTA SURABAYA*. Publik: *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 10(3), 772–784.
- Pemerintah Kabupaten Karawang. (2023). [karawangkab.go.id: https://karawangkab.go.id/dokumen/badanpenanggulangan-bencana-daerah](https://karawangkab.go.id/dokumen/badanpenanggulangan-bencana-daerah).
- Peraturan Bupati Karawang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Tertib BPBD Kabupaten Karawang. (n.d.).
- Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala BNPB. Nomor 1 Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- PP. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- PP Presiden. Nomor 8 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.